

Kebijakan Fiskal dan Resistensi Sosial: Studi Kasus Protes Kenaikan Pajak di Kab. Pati Jawa Tengah 2025

Teguh Abdul Aziz^{1*}, Nida Arifah², Hizqiel Nadjib Yasin³, Rapi Badrun Munawwar,⁴

Qiny Shonia Az zahra⁵, Tuti Adi Tama⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Abstrak

Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengatur kondisi ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Namun, implementasi kebijakan ini tidak jarang menimbulkan respons negatif dari masyarakat, khususnya ketika menyangkut kenaikan pajak. Penelitian ini mengkaji dinamika resistensi sosial terhadap kebijakan kenaikan pajak yang diberlakukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tahun 2025. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya protes yang dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi sosial dipicu oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah, minimnya transparansi dalam penggunaan dana pajak, serta beban pajak yang dirasakan tidak adil di antara berbagai sektor usaha. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan fiskal yang lebih partisipatif, akuntabel, dan adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal agar dapat mengurangi potensi konflik sosial serta menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Resistensi Sosial, Pajak Pati.

Abstract

Fiscal policy serves as a crucial instrument for the government in managing economic conditions through state revenue and expenditure. However, the implementation of such policies often triggers public discontent, especially when it involves tax increases. This study explores the dynamics of social resistance to the tax hike policy enacted in Pati Regency, Central Java, in 2025. The research is grounded in the widespread protests by small and medium-sized enterprise (SME) actors who felt disadvantaged by the policy. A qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct field observation, and analysis of relevant documents. The findings reveal that social resistance was driven by inadequate public outreach, limited transparency in how tax funds were utilized, and perceptions of unfair tax burdens across business sectors. The study concludes that a more participatory, accountable, and locally adaptive fiscal policy is necessary to reduce the risk of social conflict and to ensure sustainable public revenue collection.

Keywords: Fiscal policy, Social Resistance, Tax Protest Pati.

Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengatur penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, serta mengelola pengeluaran untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dipandang sebagai alat untuk

menstabilkan kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal memegang peranan yang lebih luas. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pengatur ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Dalam implementasinya, kebijakan fiskal tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Kebijakan seperti kenaikan pajak, meskipun memiliki tujuan ekonomi tertentu, seringkali menimbulkan penolakan di tingkat akar rumput. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya transparansi, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, atau karena masyarakat merasa terbebani secara ekonomi. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tahun 2025, di mana kebijakan kenaikan pajak memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat. Protes tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat rentan menimbulkan resistensi.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama: Bagaimana bentuk resistensi sosial yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati? Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut? Dan bagaimana kebijakan fiskal dapat dirancang agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan fiskal dan reaksi sosial masyarakat, khususnya dalam konteks kenaikan pajak. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan prinsip keislaman dalam pengelolaan keuangan negara. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya merancang kebijakan publik yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat, sehingga menciptakan harmoni antara negara dan warganya.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.

Menurut Sadono Sukirno (2006), kebijakan fiskal adalah langkah- dalam perbelanjaannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

ECONOMIE

Menurut Soediyono Reksoprayitno (2000), kebijakan fiskal sering disebut "politik fiskal" atau "*fiscal policy*" yang diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri atas penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa "*government expenditure*" dan "*government transfer*". Kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil "*government expenditure*" dan/atau memperbesar atau memperkecil "*government transfer*" yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya perekonomian.

Menurut Nopirin (1987), kebijakan fiskal terdiri atas perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk memengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang dipakai adalah budget defisit, yaitu selisih antara pengeluaran pemerintah (dan pembayaran transfer) dan penerimaan terutama dari pajak. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber- sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Bagian kedua "Tinjauan Pustaka" membahas gap penelitian yang akan diekspos dan dipecahkan. Aliran semua ide dituntut untuk menjadi jelas, terhubung, disusun dengan baik dan dikembangkan dengan baik. Ini berfungsi sebagai sumber pertanyaan penelitian dan terutama dasar atau hipotesis yang menanggapi tujuan penelitian.

2. Kebijakan Fiskal Sebagai Pengendali Anggaran serta macam macam anggaran

Kajian mengenai kebijakan fiskal sebagai instrumen pengendali anggaran telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi, baik klasik maupun kontemporer. Pemikiran Keynes (1936) misalnya, menekankan bahwa kebijakan fiskal merupakan sarana utama pemerintah untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Ia berpendapat bahwa pada saat perekonomian mengalami resesi, belanja negara perlu ditingkatkan guna merangsang permintaan agregat, sedangkan ketika terjadi inflasi yang tinggi, pengeluaran pemerintah sebaiknya ditekan atau pajak dinaikkan untuk menahan lonjakan permintaan. Pandangan ini menegaskan fungsi kebijakan fiskal sebagai stabilisator yang sekaligus berperan dalam menjaga keseimbangan anggaran negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Musgrave (1959) dalam karyanya *The Theory of Public Finance* membagi fungsi kebijakan fiskal ke dalam tiga aspek utama, yakni alokasi sumber daya, distribusi

ECONOMIE

pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Fungsi stabilisasi dianggap sebagai kunci dalam pengendalian anggaran, sebab melalui fungsi ini pemerintah dapat menahan gejolak defisit yang terlalu besar maupun mengoptimalkan surplus agar lebih produktif. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya dilihat sebagai mekanisme teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen yang menentukan arah pembangunan ekonomi.

Dalam literatur yang lebih mutakhir, Mankiw (2018) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya digunakan untuk menjaga keseimbangan fiskal jangka pendek, melainkan juga untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Hal ini tercermin dalam praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia yang selalu diarahkan untuk menekan defisit, menjaga disiplin fiskal, dan pada saat yang sama mengalokasikan belanja pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Temuan empiris turut memperkuat peran kebijakan fiskal dalam pengendalian anggaran. Blanchard dan Perotti (2002) melalui studinya menunjukkan bahwa respon fiskal terhadap guncangan ekonomi mampu memperkecil fluktuasi siklus bisnis, sehingga anggaran negara lebih terkendali. Sementara itu, Aschauer (1989) menekankan bahwa belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya memperluas basis penerimaan negara yang berguna untuk memperbaiki posisi anggaran.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa literatur ekonomi menegaskan peran ganda kebijakan fiskal, yaitu sebagai pengendali anggaran sekaligus sarana stabilisasi makroekonomi. Baik dalam teori klasik maupun penelitian kontemporer, keberhasilan kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa mengorbankan kesinambungan pembangunan.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Anggaran

Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, terdapat empat macam jenis kebijakan anggaran yaitu:

a. Anggaran Berimbang

Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.

b. Anggaran Dinamis

Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat.

ECONOMIE

c. Anggaran Defisit

Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, di antaranya menciptakan uang baru, dan melakukan pinjaman (dalam/luar negeri). Mulai tahun 2000 APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Surplus

Anggaran surplus memiliki ciri dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

4. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah memengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Rahardja dan Manurung (2005), hal ini dilakukan dengan cara memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Lebih lanjut, Rahardja dan Manurung (2005) menjelaskan bahwa tujuan kebijakan fiskal adalah mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, yang dalam implementasinya bertujuan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Rahardja dan Manurung (2005), kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan berikut.

a. Meningkatkan laju investasi

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi pada sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Untuk itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana pada sektor publik.

b. Mendorong investasi optimal secara sosial

Kebijakan fiskal bertujuan mendorong investasi optimal secara sosial karena investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara yang secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal.

c. Meningkatkan kesempatan kerja

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan

ECONOMIE

mendorong perusahaan tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Langkah ini juga diiringi dengan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya sehingga pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.

d. Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklus pada masa boom, pemerintah harus menerapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki yang timbul dari kenaikan harga pasar. Adapun bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah digunakan untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

e. Menanggulangi inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditas. Hal ini disebabkan pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

f. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri atas upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah, seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

5. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Peningkatan Produksi, Kesempatan kerja dan konflik stabilitas moneter

Kebijakan fiskal pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan anggaran, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap sektor riil perekonomian. Melalui belanja publik dan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional. Misalnya, investasi anggaran negara pada pembangunan infrastruktur mampu menurunkan biaya distribusi, memperbaiki konektivitas antarwilayah, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan output.

Keterkaitan dengan kesempatan kerja juga sangat jelas. Pemikiran Keynes menekankan bahwa pada saat permintaan agregat menurun, intervensi pemerintah melalui peningkatan pengeluaran negara dapat memicu kenaikan produksi yang pada gilirannya memperluas lapangan kerja. Program pembangunan yang berbasis anggaran negara, terutama di sektor padat karya,

ECONOMIE

seringkali memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia, kebijakan belanja negara yang diarahkan pada sektor infrastruktur dan program bantuan sosial terbukti mendukung penyerapan tenaga kerja, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi yang masih terbatas.

Namun, hubungan antara kebijakan fiskal dengan stabilitas moneter kerap menimbulkan ketegangan. Ketika belanja negara diperluas secara agresif, terutama melalui pembiayaan defisit, terdapat risiko munculnya tekanan inflasi. Defisit yang dibiayai melalui utang atau pencetakan uang berpotensi mengganggu kestabilan nilai tukar serta memicu ketidakpastian moneter. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan mendorong produksi dan kesempatan kerja bisa berbenturan dengan tujuan otoritas moneter dalam menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang.

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang terlalu ketat memang dapat membantu menjaga stabilitas moneter, tetapi seringkali menekan pertumbuhan produksi dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Pengetatan belanja negara dan peningkatan pajak untuk menjaga disiplin fiskal bisa memperlambat aktivitas ekonomi, sehingga daya serap tenaga kerja menurun. Kondisi ini menggambarkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan.

Dengan demikian, hubungan kebijakan fiskal terhadap produksi dan kesempatan kerja pada dasarnya bersifat positif, selama kebijakan tersebut diarahkan pada pengeluaran yang produktif. Akan tetapi, dampak terhadap stabilitas moneter sangat bergantung pada bagaimana defisit dan sumber pembiayaannya dikelola. Oleh karena itu, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci agar tujuan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga dapat tercapai secara seimbang.

6. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Non Fiskal

Hubungan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan ekonomi non-fiskal adalah saling melengkapi dalam pengelolaan ekonomi negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, pajak, dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur perekonomian. Sementara itu, kebijakan ekonomi non-fiskal mencakup kebijakan lain di luar fiskal yang juga berdampak pada ekonomi, seperti kebijakan moneter, regulasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan struktural.

Kebijakan Fiskal fokus pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara melalui pajak dan belanja pemerintah guna mengendalikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Kebijakan ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan

ECONOMIE

menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) .

Kebijakan Ekonomi Non-Fiskal mencakup kebijakan moneter (pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh Bank Indonesia), serta kebijakan lainnya seperti kebijakan perdagangan dan regulasi yang mendukung pencapaian tujuan ekonomi yang lebih luas. Kebijakan ini bisa berfungsi menambah atau melengkapi kebijakan fiskal agar pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lebih optimal .

Kedua kebijakan ini saling berinteraksi dan membutuhkan koordinasi agar kebijakan ekonomi makro dapat berjalan efektif. Misalnya, saat kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter perlu menyesuaikan untuk menghindari inflasi berlebihan atau defisit anggaran yang tidak terkendali .

7. Studi kasus: Resistensi Sosial terhadap Kenaikan Pajak UMKM di Kabupaten Pati, Jawa Tengah 2025

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan kebijakan kenaikan tarif pajak daerah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat pembiayaan program pembangunan infrastruktur. Namun, berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai laporan media dan publikasi ekonomi daerah, kebijakan tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah pelaku UMKM, terutama pada sektor kuliner dan pengolahan hasil pertanian.

Pelaku usaha menganggap kebijakan ini belum tepat waktu karena kondisi ekonomi pascapandemi masih belum sepenuhnya pulih, sedangkan daya beli masyarakat cenderung menurun. Berbagai sumber pemberitaan menyebutkan adanya beberapa bentuk respons sosial yang muncul, seperti audiensi ke DPRD Kabupaten Pati, aksi penyampaian pendapat di ruang publik, serta petisi daring yang mendapat dukungan luas dari masyarakat pelaku usaha.

Berdasarkan hasil kajian terhadap data sekunder, resistensi sosial terhadap kebijakan tersebut dipicu oleh tiga hal pokok:

1. Kurangnya sosialisasi. Pemerintah daerah belum melakukan penyampaian informasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait mekanisme kenaikan pajak dan dasar kebijakan yang digunakan.
2. Minimnya transparansi. Tidak tersedia penjelasan terbuka mengenai alokasi tambahan dana pajak, sehingga menimbulkan keraguan publik terhadap efektivitas penggunaannya.
3. Persepsi ketidakadilan. Kebijakan kenaikan pajak dinilai lebih membebani pelaku usaha kecil dibandingkan sektor menengah dan besar yang memiliki kapasitas finansial lebih tinggi.

ECONOMIE

Sebagai respons atas meningkatnya ketegangan sosial, pemerintah daerah kemudian melakukan penyesuaian kebijakan, antara lain dengan memberikan tarif lebih ringan bagi usaha mikro, masa transisi selama enam bulan, serta membuka forum komunikasi publik secara berkala. Langkah ini dinilai berhasil menurunkan eskalasi resistensi sosial dan meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal tersebut.

Kasus di Kabupaten Pati ini memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan fiskal. Secara teoritis, kebijakan fiskal bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, namun tanpa memperhatikan kondisi sosial dan persepsi publik, implementasinya berpotensi menimbulkan konflik sosial. Resistensi yang terjadi mencerminkan adanya kesenjangan kepercayaan (*trust gap*) antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi partisipatif, dengan melibatkan asosiasi UMKM, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam proses perumusan kebijakan fiskal daerah.
2. Transparansi anggaran, melalui publikasi laporan penggunaan pajak secara berkala di situs resmi pemerintah atau forum publik.
3. Penerapan skema pajak progresif dan insentif, yaitu memberikan keringanan bagi usaha kecil dan menengah serta mengenakan tarif lebih tinggi pada sektor usaha besar.
4. Pendekatan ekonomi Islam, dengan menyesuaikan kebijakan pajak berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan distribusi) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Al-'adl berarti keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Dalam konteks pajak, prinsip ini mengharuskan sistem perpajakan bersifat adil dan proporsional, sehingga tidak membebani kelompok miskin dan tidak memberikan keistimewaan berlebihan kepada kelompok kaya. Maslahah 'ammah berarti bahwa kebijakan pajak harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan negara atau elite tertentu.
5. Evaluasi berkala, untuk menilai dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan fiskal yang diterapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Fokus kajian diarahkan pada kebijakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai contoh resistensi sosial terhadap kebijakan fiskal. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan berita daring yang relevan. Populasi penelitian mencakup seluruh kebijakan fiskal daerah dan reaksi masyarakat yang terdokumentasi, sedangkan sampelnya dipilih

secara purposive, yakni sumber yang membahas langsung topik resistensi sosial akibat kebijakan pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur, sementara analisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data. Variabel utama meliputi kebijakan fiskal (pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah) dan resistensi sosial (reaksi masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan pajak sebesar 15% yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2025 menimbulkan berbagai bentuk resistensi sosial dari pelaku usaha kecil. Berdasarkan laporan media dan publikasi akademik, protes dilakukan dalam bentuk petisi daring, audiensi ke DPRD, serta penyampaian aspirasi di ruang publik. Para pelaku UMKM menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat pascapandemi dan dilaksanakan tanpa sosialisasi yang memadai.

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah daerah menilai kenaikan pajak diperlukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menopang program pembangunan infrastruktur. Namun, kurangnya komunikasi dan transparansi dalam menjelaskan arah penggunaan dana pajak menyebabkan munculnya ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave (1959) bahwa fungsi kebijakan fiskal tidak hanya sebagai alat pengaturan penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan distribusi dan stabilitas sosial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori Keynes (1936) yang menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan daya beli masyarakat agar tidak memperparah ketimpangan ekonomi. Kenaikan pajak yang diterapkan secara merata pada semua sektor, tanpa melihat kemampuan ekonomi pelaku usaha, berpotensi menekan aktivitas produksi dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat bawah. Dalam kondisi seperti ini, resistensi sosial menjadi bentuk ekspresi terhadap ketidakselarasan antara kebijakan ekonomi dan realitas sosial.

Lebih lanjut, Mankiw (2018) menekankan pentingnya kepercayaan publik dalam keberhasilan kebijakan fiskal. Kepercayaan ini hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Kurangnya pelibatan publik dalam kebijakan fiskal daerah menciptakan jurang kepercayaan (*trust gap*) antara pemerintah dan masyarakat, yang akhirnya memicu penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal yang baik harus mencerminkan nilai *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Karim (2013) menegaskan bahwa keuangan publik dalam Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, kebijakan pajak

ECONOMIE

perlu memperhatikan proporsionalitas dan kemampuan masyarakat, agar beban fiskal tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Secara umum, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa resistensi sosial terhadap kebijakan fiskal di Kabupaten Pati bukan sekadar reaksi spontan masyarakat terhadap kenaikan pajak, melainkan akibat dari kurangnya komunikasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan fiskal. Untuk menghindari konflik sosial di masa depan, pemerintah perlu mengembangkan tata kelola fiskal yang partisipatif (*participatory fiscal governance*), di mana masyarakat terlibat aktif dalam tahap perumusan, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan.

Kesimpulan

1) Kesimpulan

Resistensi sosial terhadap kebijakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati tahun 2025 dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kurangnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah daerah, (2) minimnya transparansi penggunaan dana pajak, dan (3) persepsi ketidakadilan antar sektor usaha. Ketiga faktor ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan ekonomi pemerintah dengan kondisi sosial masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Secara implikatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah mampu membangun kepercayaan dan partisipasi publik. Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Integrasi nilai-nilai *good governance* dan prinsip ekonomi Islam seperti *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dapat menjadi dasar moral dan sosial dalam merancang kebijakan fiskal yang berkeadilan.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada jenis data yang digunakan, yaitu hanya bersumber dari literatur sekunder seperti jurnal, laporan resmi, dan berita daring. Karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan dinamika sosial yang terjadi secara langsung di lapangan. Penelitian berikutnya disarankan untuk memadukan metode studi pustaka dengan penelitian lapangan agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan representatif.

2) Saran

1. Perluasan Cakupan Penelitian. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan lebih dari satu wilayah agar dapat dibandingkan antara daerah dengan karakter sosial ekonomi yang berbeda.
2. Integrasi Metode Penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif agar hasil analisis lebih objektif dan terukur.

ECONOMIE

3. Penguatan Partisipasi Publik. Pemerintah daerah perlu membangun forum komunikasi terbuka dengan pelaku usaha dan masyarakat guna memperkuat penerimaan kebijakan fiskal.
4. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. Nilai keadilan dan kemaslahatan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan fiskal agar mampu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.
5. Pengembangan Sistem Transparansi Digital. Diperlukan inovasi dalam penyampaian informasi fiskal berbasis teknologi agar masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan dana publik.

Daftar Pustaka

- Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive. *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0).
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An Empirical Characterization of The Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. *Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368.
- Karim, A. A. (2013). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Nopirin. (1987). *Ekonomi Moneter Buku Dua*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2005). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.